

Sinergi Perguruan Tinggi Dan Forum Kabupaten Sehat Dalam Pengembangan Pariwisata Sehat di Kabupaten Nganjuk

Muhammad Shohiburrida¹, Indrian Supheni², Hermin Diyan Pratiwi³

^{1,2} Universitas PGRI Mpu Sindok, Indonesia

³Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, Indonesia

Received : 19 Oktober 2025, Revised : 23 Oktober 2025, Published : 4 November 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Muhammad Shohiburrida

E-mail: shohiburrida53@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Nganjuk memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan, antara lain Air Terjun Sedudo, Taman Rekreasi Anjuk Ladang (TRAL), Roro Kuning, Goa Margo Tresno, dan Kolam Renang Sri Tanjung. Namun, pengelolaan pariwisata masih menghadapi tantangan sanitasi, keterbatasan fasilitas inklusif, rendahnya penerapan kawasan tanpa rokok (KTR), serta belum meluasnya akses restoran yang memiliki SLHS. Forum Kabupaten Sehat (FKS) berperan strategis dalam mengintegrasikan konsep pariwisata sehat dan inklusif dengan penguatan kelembagaan hingga ke forum kecamatan sehat dan Pokja Desa Sehat. Metode pengabdian dilakukan melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan tahapan pemetaan potensi masalah, sosialisasi konsep pariwisata sehat, pendampingan kelembagaan, advokasi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan FKS berkontribusi dalam peningkatan sanitasi, penerapan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), penguatan kelembagaan multi-level, serta pemetaan fasilitas kesehatan terdekat dengan destinasi wisata. Keberhasilan pengembangan pariwisata sehat di Nganjuk ditopang oleh kolaborasi lintas sektor, penerapan SLHS, dan pemetaan puskesmas terdekat. Rekomendasi diarahkan pada penguatan regulasi daerah, dan perluasan penerapan SLHS.

Kata kunci - pariwisata sehat, inklusif, SLHS, forum kabupaten sehat (FKS)

Abstract

Nganjuk Regency has natural, cultural, and artificial tourism potential, including Sedudo Waterfall, Anjuk Ladang Recreation Park (TRAL), Roro Kuning, Margo Tresno Cave, and Sri Tanjung Swimming Pool. However, tourism management still faces challenges such as sanitation issues, limited inclusive facilities, low implementation of smoke-free areas (KTR), and the limited access to restaurants that have SLHS. The Healthy Regency Forum (FKS) plays a strategic role in integrating the concept of healthy and inclusive tourism by strengthening institutional structures down to the Healthy Subdistrict Forums and Village Health Working Groups (Pokja Desa Sehat). The community service method was carried out through Participatory Rural Appraisal (PRA) with stages including potential-problem mapping, dissemination of the healthy tourism concept, institutional mentoring, policy advocacy, and monitoring and evaluation. The results show that FKS has contributed to improving sanitation, implementing the Hygiene and Sanitation Eligibility Certificate (SLHS), strengthening multi-level institutions, and mapping nearby health facilities around tourist destinations. The success of developing healthy tourism in Nganjuk is supported by cross-sector collaboration, the implementation of SLHS, and the mapping of nearby community health centers (puskesmas). Recommendations are directed toward strengthening local regulations and expanding the implementation of SLHS.

Keywords - healthy tourism, SLHS, healthy regency forum (FKS)

How To Cite : Shohiburrida, M., Supheni, I., & Pratiwi, H. D. (2025). Sinergi Perguruan Tinggi Dan Forum Kabupaten Sehat Dalam Pengembangan Pariwisata Sehat di Kabupaten Nganjuk . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(2), 1440 - 1449. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.641>

Copyright ©2025 Muhammad Shohiburrida, Indrian Supheni, Hermin Diyan Pratiwi

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) mendorong daerah mencapai kondisi bersih, nyaman, aman, dan sehat. Kabupaten yang berhasil mendapatkan penghargaan Swasti Saba menunjukkan implementasi KKS yang baik, menjadi indikator keberhasilan integrasi kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan pilar strategis pembangunan ekonomi. Namun, pengembangannya secara berkelanjutan kerap dihadapkan pada dilema antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan yang mencakup aspek kesehatan, keamanan, dan inklusivitas sosial. Tantangan krusial di berbagai destinasi meliputi rendahnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimnya fasilitas yang mendukung akses bagi semua wisatawan difabel, serta kurangnya upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh Daya Tarik Wisata (DTW). Rendahnya kesadaran kolektif terhadap kebersihan dan kesehatan di kalangan wisatawan dan pengelola juga menjadi isu berulang.

Urgensi pengembangan pariwisata sehat dan inklusif menjadi krusial karena kontribusinya melampaui kelestarian budaya dan ekonomi lokal; ia secara langsung memengaruhi kesehatan masyarakat dan ketahanan ekosistem (Folke et al., 2002). Upaya mewujudkan pariwisata sehat ini ditopang oleh kerangka kelembagaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS), yang diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. KKS mendefinisikan suatu daerah sebagai kondisi yang bersih, nyaman, aman, dan sehat (Palutturi & al., 2024).

Dalam konteks implementasi di lapangan, Tataan Pariwisata Sehat telah ditetapkan secara eksplisit sebagai salah satu dari sembilan tatanan utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Forum Kabupaten Sehat (FKS) dan Universitas PGRI Mpu Sindok hadir sebagai wadah multi-pihak yang menjembatani Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memfasilitasi penguatan kelembagaan hingga ke tingkat desa. Kolaborasi akademis dan praktis menjadi fondasi penguatan FKS, memastikan program KKS berjalan dengan baik.

Kajian ini berakar pada kerangka filosofis Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*), yang diperkuat oleh Teori Ketahanan Sosial-Ekologis (Folke et al., 2006). Dalam konteks persepsi wisatawan, menurut Supheni, et al. (2023) menemukan bahwa persepsi wisatawan di Nganjuk terhadap *sustainable tourism* adalah bahwa pariwisata paling berdampak pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Temuan ini menegaskan perlunya memperkuat kesadaran wisatawan terhadap dimensi lingkungan agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara seimbang di destinasi wisata.

Pariwisata Sehat (*Healthy Tourism*) adalah instrumen operasional yang diterjemahkan melalui prinsip BISA (Bersih, Indah, Sehat, Aman) (Kemenparekraf, 2020). Implementasinya mencakup tiga pilar utama yang didorong FKS:

1. Higiene dan Keamanan Pangan: Kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Tempat Pengelolaan Pangan dan fasilitas umum (Kemenkes RI, 2014).
2. Kesehatan Lingkungan: Upaya pengelolaan sampah secara mandiri oleh Daya Tarik Wisata (DTW), yang vital untuk keberlanjutan.
3. Keselamatan dan Lingkungan Sehat: Penerapan fasilitas inklusif, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada destinasi wisata serta sistem tanggap darurat yang efisien (Rahman & Munandar, 2021).

Menurut WHO, konsep Pariwisata Inklusif (*Inclusive Tourism*) melengkapi kerangka *Sustainable Tourism* dengan memastikan pengalaman berwisata dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas (Darmawan & Hadi, 2021). Penerapan pariwisata inklusif dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas khusus ramah disabilitas, ramah anak, dan ramah orang tua.

Isu pengelolaan sampah merupakan pilar krusial bagi keberlanjutan lingkungan yang secara langsung beririsan dengan sektor pariwisata. Peningkatan aktivitas wisata dan lonjakan jumlah pengunjung di destinasi sering kali berkorelasi langsung dengan peningkatan timbulan sampah menciptakan ancaman serius terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan publik (Fitri et al., 2020).

Pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk, termasuk di kawasan pariwisata, masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kemandirian pengelolaan di tingkat Daya Tarik Wisata (DTW). Meskipun Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah (Keputusan Bupati Nganjuk, 2025) yang menekankan pentingnya penanganan sampah terpadu dan sistematis, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Keputusan Bupati Nganjuk, 2025). Kondisi ini tercermin jelas di beberapa DTW utama. Misalnya, di Air Terjun Sedudo,

salah satu ikon wisata Nganjuk, ditemukan sampah-sampah bekas makanan dan minuman berserakan dan kebersihan objek wisata masih kurang, yang mengindikasikan belum adanya sistem pengelolaan kebersihan yang terjaga secara mandiri oleh pengelola wisata maupun partisipasi aktif pengunjung (Setyawasih, et al., 2007)

Kekurangan ini diperparah oleh temuan di lapangan bahwa sampah liar sering menumpuk di bahu jalan akses menuju wisata, seperti di jalur menuju Air Terjun Sedudo (Sunyoto, 2021). Kondisi ini tidak hanya mengurangi asrinya pemandangan dan estetika lingkungan, tetapi juga merupakan sumber pencemaran. Walaupun Pemkab Nganjuk telah berupaya mengembangkan sistem terpusat seperti TPST Kartoharjo dan menginisiasi program berbasis komunitas seperti Program Sedekah Sampah, fokus utama program-program tersebut adalah pada wilayah perkotaan dan permukiman (Purnomo, 2023).

Akibatnya, penanganan sampah di kawasan yang lebih terpencil seperti desa-desa penyangga wisata dan di dalam area DTW sendiri sering kali masih dilakukan secara tradisional, seperti menimbun atau membakar sampah di lahan kosong—praktik yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan justru merusak kualitas udara dan lingkungan (Romanda & Rahmanto, 2022). Untuk mencapai pariwisata berkelanjutan, diperlukan upaya perbaikan dan penambahan infrastruktur, termasuk pengelolaan sampah mandiri yang optimal di setiap lokasi wisata (Hamdani et al., 2024)

Rumusan Masalah utama yang menjadi fokus kajian ini adalah Bagaimana peran kelembagaan Forum Kabupaten Sehat (FKS), didukung oleh kolaborasi dengan lembaga akademis, dalam mengadvokasi dan mengimplementasikan konsep Pariwisata Sehat dan Inklusif agar dapat memenuhi Pariwisata Sehat yang eksplisit dalam kerangka Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami dan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forum kecamatan sehat, dan Pokja Desa Sehat dalam mewujudkan kawasan wisata yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal* / PRA), yang menekankan keterlibatan kelompok kerja (pojka) desa sehat, UMKM, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Kepala Daerah. Pendekatan ini dipilih agar proses pengembangan pariwisata sehat dan inklusif benar-benar berakar pada kebutuhan, potensi, serta kapasitas komunitas setempat. Jenis kegiatan yang dilakukan merupakan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan komunitas dan penguatan kelembagaan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Nganjuk:

1. Pemetaan potensi dan permasalahan pada destinasi wisata untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas terkait SLHS, sanitasi, fasilitas kesehatan, dan aksesibilitas inklusif.
2. Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat kepada masyarakat, termasuk di dalamnya tentang pariwisata sehat dan inklusif.
3. Penguatan kelembagaan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa melalui koordinasi lintas sektor.
4. Advokasi kebijakan, dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan terkait tatanan pariwisata sehat.
5. *Monitoring* dan evaluasi, untuk menilai efektivitas kegiatan serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas lingkungan wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan potensi dan permasalahan

Pemetaan masalah Kabupaten/Kota Sehat dilakukan untuk melihat kondisi dan tantangan pada setiap tatanan yang menjadi indikator penilaian. Kegiatan ini mencakup tatanan Sehat Mandiri, Perumahan dan Permukiman (Perkim), Pendidikan, Pasar, Perkantoran dan Perindustrian, Lalu Lintas, Sosial, Kebencanaan, dan Pariwisata.

Setiap tatanan memiliki fokus dan permasalahan tersendiri. Pada tatanan Sehat Mandiri, perhatian diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Pada tatanan Perkim, isu utama meliputi akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Di bidang Pendidikan, pemetaan menyoroti ketersediaan fasilitas sekolah sehat dan perilaku hidup bersih sehat. Tatanan Pasar serta Perkantoran dan Perindustrian lebih menekankan kebersihan, pengelolaan sampah, dan kawasan tanpa rokok. Tatanan Lalu Lintas melihat keselamatan pengguna jalan,

sementara tatanan Sosial mencakup dukungan masyarakat terhadap kelompok rentan. Pada tatanan Kebencanaan, fokusnya adalah kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Sedangkan pada tatanan Pariwisata, penekanan diberikan pada kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan destinasi wisata.

Berkaitan dengan tatanan Pariwisata tersebut, dilakukan pemetaan potensi dan permasalahan untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan prioritas di destinasi wisata (DTW), terutama terkait sanitasi, fasilitas kesehatan, dan aksesibilitas inklusif. Kegiatan ini melibatkan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) sebagai penanggung jawab pengelolaan DTW di Kabupaten Nganjuk, Dinas Kesehatan, seluruh OPD terkait, pihak kecamatan, Forum Kecamatan Sehat, Kelompok Kerja (Pokja) Desa Sehat, serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Setiap pihak yang diundang menyampaikan permasalahan dan kondisi aktual di lapangan. Berdasarkan hasil pemetaan, ditemukan beberapa permasalahan utama di DTW, yaitu:

- (a) Belum adanya penerapan kawasan tanpa rokok.
- (b) Belum terdapat sistem pengelolaan sampah mandiri oleh DTW.
- (c) Masih minimnya warung atau restoran yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- (d) Masih minimnya fasilitas inklusif di DTW



Gambar 1. FGD Bersama OPD, Kecamatan, FKS, dan Pokja Desa

Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat

Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami konsep tatanan sehat di berbagai sektor kehidupan seperti perumahan, pendidikan, pasar, perkantoran, lalu lintas, sosial, kebencanaan, hingga pariwisata.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan melalui pertemuan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, serta kelompok masyarakat seperti Forum Kecamatan Sehat, Pokja Desa Sehat, dan Pokdarwis. Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan informasi tentang pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan sampah mandiri, kawasan tanpa rokok, serta peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja.

Khusus pada tatanan Pariwisata Sehat, sosialisasi difokuskan pada peningkatan kesadaran pelaku wisata untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan pengunjung, serta memastikan akses yang ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Materi sosialisasi mencakup pentingnya fasilitas sanitasi yang memadai, sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) bagi warung dan restoran di kawasan wisata, serta penerapan prinsip inklusivitas dalam pelayanan wisata.

Dampak dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya komitmen masyarakat dan pengelola destinasi wisata dalam mewujudkan lingkungan pariwisata yang bersih, sehat, dan ramah bagi semua. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat secara berkelanjutan.



Gambar 2. Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat di Kecamatan Sawahan

Penguatan kelembagaan secara berjenjang

Penguatan kelembagaan dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas pelaksana program Kabupaten/Kota Sehat di tingkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan, Forum Kecamatan Sehat, hingga Pokja Desa Sehat. Pendekatan ini memastikan setiap tingkatan memiliki pemahaman dan peran yang selaras dalam mendukung pelaksanaan program.

Pelaksanaan penguatan dilakukan satu kali dalam satu kecamatan, dengan menghadirkan seluruh unsur terkait secara bersamaan. Dalam satu kegiatan, pihak kecamatan, Forum Kecamatan Sehat, dan Pokja Desa Sehat mengikuti sesi pembekalan dan pendampingan teknis. Pola ini mempercepat komunikasi dan memperkuat koordinasi antar-level kelembagaan.

Kegiatan penguatan dilakukan secara dua arah. Selain penyampaian materi oleh tim fasilitator, peserta juga aktif berdiskusi dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah kegiatan tatap muka selesai, komunikasi dilanjutkan melalui konsultasi daring (*online*) agar pendampingan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh dokumen pendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat terdokumentasi dengan baik. Dokumen yang dimaksud meliputi Surat Keputusan (SK), rencana kerja tahunan, notulen kegiatan, serta dokumentasi foto. Dengan sistem pendampingan ini, setiap kecamatan dan desa memiliki data dan arsip yang rapi, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pelaporan tingkat kabupaten.



Gambar 3. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan di Kecamatan Loceret

Advokasi kebijakan

Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Kabupaten Sehat dengan melibatkan Bupati, Wakil Bupati, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Fokus utama advokasi adalah mengidentifikasi kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pencapaian tatanan sehat, seperti peraturan tentang pengelolaan sampah, kawasan tanpa rokok, kebersihan lingkungan, dan tata kelola pariwisata sehat. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan baru atau revisi regulasi yang sudah ada.

Proses advokasi dilakukan melalui pertemuan koordinasi dan dialog kebijakan antara Forum Kabupaten Sehat dan pemerintah daerah. Dalam forum ini, disampaikan data, hasil pemetaan lapangan, serta temuan dari kecamatan dan desa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan advokasi ini menghasilkan peningkatan komitmen lintas sektor dan membuka ruang kolaborasi antar-OPD dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan destinasi wisata yang sehat dan inklusif. Dengan demikian, advokasi menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program Kabupaten/Kota Sehat melalui dukungan regulasi yang kuat di tingkat daerah.



Gambar 4. Advokasi Kebijakan Bersama Bupati, Wakil Bupati, Kepala OPD, dan FKS

Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) menjadi elemen penting agar pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat tetap fokus, terukur, dan akuntabel. Dalam konteks program nasional Kabupaten/Kota Sehat, monev ini terkait dengan penilaian tingkat nasional (Penghargaan Swasti Saba) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar nasional. Kegiatan ini dilakukan terutama menjelang penilaian tingkat nasional program Kabupaten/Kota Sehat, yang meliputi verifikasi dokumen, kondisi lapangan, dan capaian indikator di setiap tatanan.

Monev dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada instrumen penilaian nasional, meliputi: kelengkapan dokumen seperti SK, rencana kerja, notulen, foto kegiatan, serta capaian setiap tatanan. Pelaksanaan monev dilakukan bersama seluruh pihak terkait, mulai dari kecamatan, Forum Kecamatan Sehat, hingga Pokja Desa Sehat, sehingga memastikan data yang dikumpulkan valid dan akurat.

Hasil monev memberikan gambaran mengenai tatanan yang sudah memenuhi standar dan tatanan yang membutuhkan perhatian lebih. Temuan ini digunakan untuk memperbaiki strategi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan kualitas dokumentasi dan laporan, sehingga mendukung penilaian tingkat nasional secara lebih efektif dan akurat.



Gambar 5. Penilaian Program Kabupaten Kota Sehat Tingkat Nasional

Wujud Dari Serangkaian Kegiatan KKS Sektor Pariwisata

Hasil dari serangkaian kegiatan Kabupaten/Kota Sehat menunjukkan kemajuan nyata di sektor pariwisata. Beberapa implementasi yang telah dilakukan meliputi:

1. Penerapan kawasan tanpa rokok di destinasi wisata, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi pengunjung.



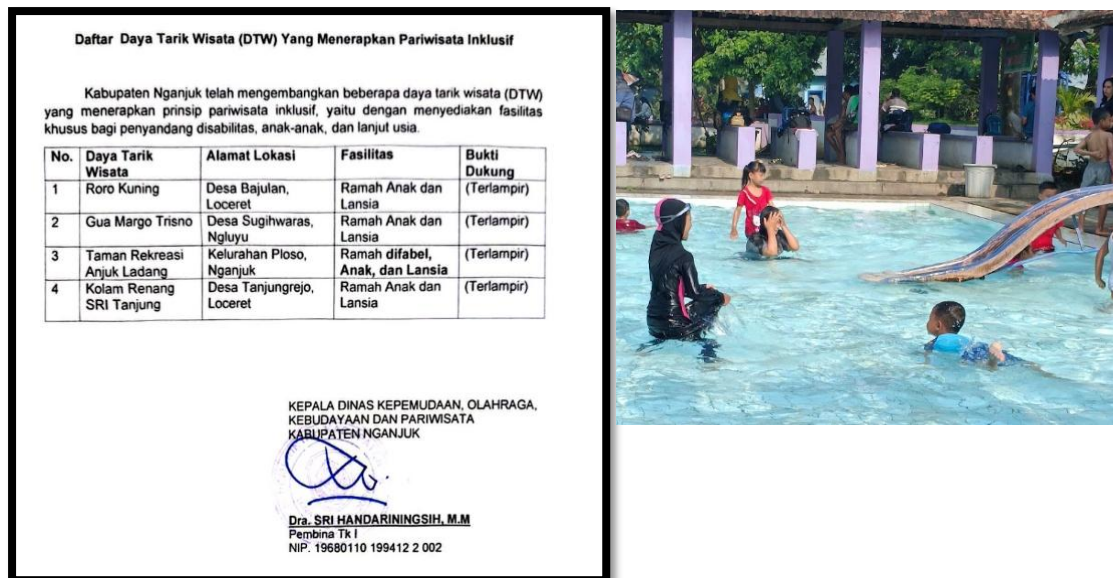
Gambar 6. Kawasan Tanpa Rokok di Taman Rekreasi Anjuk Ladang dan Alun-Alun Nganjuk

2. Pengelolaan di DTW yang berkolaborasi dengan bank sampah, yang meningkatkan kebersihan lingkungan dan mendukung perilaku hidup bersih sehat.



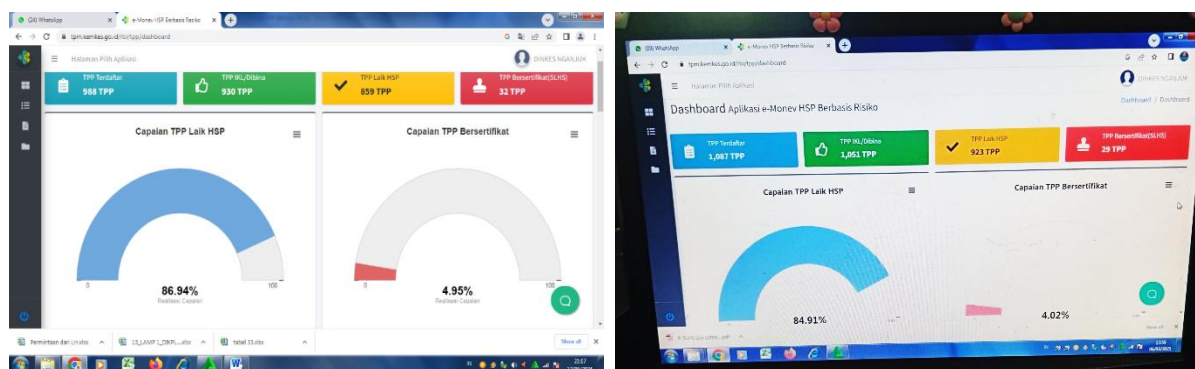
Gambar 7. Pengelolaan sampah bersama Bank Sampah

3. Penerapan pariwisata inklusif, dengan memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak, sehingga semua pengunjung dapat menikmati fasilitas wisata dengan aman dan nyaman.



Gambar 8. Fasilitas Inklusif DTW

4. Peningkatan jumlah warung atau restoran yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menunjukkan peningkatan kualitas keamanan pangan dari 3,24% menjadi 3,31%.



Gambar 9. Peningkatan SLHS

Kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Forum Kecamatan Sehat, Pokja Desa Sehat, dan Pokdarwis efektif dalam mewujudkan destinasi wisata yang sehat, bersih, dan inklusif. Implementasi ini juga menjadi bukti nyata bahwa program Kabupaten/Kota Sehat dapat diterapkan secara praktis di lapangan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha wisata terhadap pentingnya standar kesehatan dan inklusivitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sinergi antara Perguruan Tinggi dan Forum Kabupaten Sehat (FKS) dalam pengembangan pariwisata sehat di Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kualitas destinasi wisata yang bersih, sehat, dan inklusif. Melalui pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*), kegiatan ini berhasil memperkuat kelembagaan dari tingkat kabupaten hingga desa, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan kawasan tanpa rokok di destinasi wisata. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam

keberhasilan program, terutama dalam advokasi kebijakan dan *monitoring* pelaksanaan tatanan pariwisata sehat.

Untuk keberlanjutan program, disarankan agar Pemerintah Daerah memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pariwisata sehat serta memperluas penerapan SLHS di seluruh Daya Tarik Wisata (DTW). Selain itu, pendampingan dan pelatihan perlu dilakukan bagi pengelola wisata, Pokja Desa Sehat, dan pelaku UMKM agar prinsip pariwisata sehat dan inklusif dapat terimplementasi secara menyeluruh dan konsisten. Diperlukan pula dukungan dan inovasi digital untuk memantau capaian tatanan sehat secara *real time* sebagai bagian dari sistem evaluasi berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan (*sustainable tourism*) di tingkat kabupaten hingga Pokja Desa dan Pokdarwis, dengan menekankan keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya agar pariwisata di Kabupaten Nganjuk semakin optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas PGRI Mpu Sindok atas dukungan akademik dan fasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Forum Kabupaten Sehat (FKS), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forum Kecamatan Sehat, Pokja Desa Sehat, serta seluruh masyarakat dan pelaku wisata yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Tanpa kerja sama dan kolaborasi lintas sektor ini, pengembangan program Kabupaten/ Kota Sehat di Kabupaten Nganjuk tidak akan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, G. E., & Hadi, W. (2021). Pengembangan Pariwisata Inklusif di Destinasi Wisata Jawa Tengah. *Jurnal Pariwisata*, 8(2), 112–125.
- Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v11i2.7912>
- Folke, C., Carpenter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C. S., & Walker, B. (2002). Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations. *Ambio: A Journal of the Human Environment*, 31(5), 437–444.
- Folke, C., Carpenter, S. R., Walker, B., Scheffer, M., Chapin, T., & Rockström, J. (2006). Regime shifts, resilience, and biodiversity in ecosystem management. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 35(1), 557–581.
- Hamdani, A., Setyawan, B., & Harsono, Y. (2024). Perencanaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lokal untuk Mendukung Pariwisata Inklusif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Edisi Khusus*.
- Husamah, H., & Prayogo, W. (2024). *Strategi Pengolahan Sampah Plastik di Tempat Wisata*. CENDEKIA GLOBAL MANDIRI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi*.
- Kepbup Nganjuk. (2025). *Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026*. Kabupaten Nganjuk.
- Kemenparakraf (2020). *Pedoman Pelaksanaan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment)*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Masjhoer, J. M. (2018). Partisipasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Pulang Sawal, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 2(2), 122-133.
- Palutturi, S., & al., et. (2024). Peran Multi-Pihak dalam Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Indonesia. *Jurnal Spoor*, 15(1), 77–90.
- Purnomo, A. H. (2023). Inovasi Peduli Lingkungan: Program Sedekah Sampah untuk Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Nganjuk). *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research*.
- Prayogo, W., Awfa, D., & Hilman, Z. (2023). Problematika Sampah di Sektor Perjalanan dan Pariwisata: Kajian Literatur. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 11(3), 896-903.
- Rahman, A., & Munandar, M. (2021). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok dalam Mewujudkan Destinasi Wisata Sehat. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(3), 189–200.
- Romanda, Y., & Rahmanto, T. A. (2022). Perencanaan Perluasan Pelayanan TPST Kartoharjo Kab.

- Nganjuk. *Envirous*, 2(2).
- Setyawasih, R. (2007). Studi Tentang Peristiwa (Event Study): Suatu Panduan Riset Manajemen Keuangan di Pasar Modal. *Jurnal Optimal*, 1(1), 52–58.
- Sujana Putra, I. W., Dewi, N. D. U., & Widanti, N. P. T. (2025). Pengelolaan Sampah Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Professional*, 12(1), 299-306.
- Sunyoto, H. S. (2021). Tumpukan Sampah Liar di Bahu Jalan Akses Menuju Wisata Air Terjun Sedudo, Lembaga Go Green Angkat Bicara. *Majanews*. Diakses pada 1 Oktober 2025
- Supheni, I., Ivada, E., Novianti, G. E., & Wiwin, W. (2023). Sustainable tourism from the perspective of tourists in Nganjuk Indonesia le. *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship (JoSTE)*, 4, 149–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/joste.v4i2.1642>
- Sutrisnawati, N. K., & Purwahita, A. R. M. (2018). Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), 49-56.
- Zahrotun, S., Irawati, N., & Prasetyo, H. (2023). Inovasi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Zero Waste. *Jurnal Pringgitan*, 2(1), 4-10.